



WALIKOTA KENDARI

KEPUTUSAN WALI KOTA KENDARI

NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

PETA JALAN IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH KOTA KENDARI

WALI KOTA KENDARI,

- Menimbang :
- a. bahwa Elektronifikasi Transaksi pemerintah daerah adalah suatu upaya mengubah transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah dari cara tunai menjadi non tunai berbasis digital;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, dalam rangka Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah perlu menyusun Peta Jalan yang ditetapkan Keputusan Wali Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Peta Jalan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Kota Kendari;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, sebagaimana telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1283);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Peta Jalan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Kota Kendari sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Peta Jalan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Kota Kendari dievaluasi tiap tri wulan untuk melihat perkembangan atau kendala pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Kota Kendari.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal, 6 Januari 2022

WALI KOTA KENDARI,



H. SULKARNAIN K.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA KENDARI

NOMOR : TAHUN 2022

TANGGAL :

TENTANG : PETA JALAN IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI
PEMERINTAH DAERAH KOTA KENDARI

I. PENDAHULUAN

Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat ETPD adalah upaya untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja daerah dari cara tunai menjadi non tunai berbasis digital.

Tujuan dilaksanakannya ETPD adalah untuk meningkatkan transparansi transaksi pemerintah daerah, sehingga mengurangi kebocoran pada sisi pendapatan daerah serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi pada sisi belanja daerah.

1. PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN DAN FISKAL DAERAH

1.1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Kota Kendari menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1

Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2019 dan Tahun 2020

No.	Kategori	Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha atas dasar Harga Konstan Kota Kendari	
		2019	2020
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.762.180.50	1.738.329.34
2.	Pertambangan dan Penggalian	376.467.99	365.681.81
3.	Industri Pengolahan	1.597.044.31	1.510.685.22
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	24.755.53	24.247.35
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	43.947.24	42.898.83
6.	Konstruksi	3.046.516.10	2.962.500.48
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi	2.756.537.73	2.616.398.62
8.	Transportasi dan Pergudangan	1.653.062.39	1.570.365.21
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	206.750.46	193.452.30
10.	Informasi dan Komunikasi	1.396.063.41	1.518.913.63
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	995.131.56	1.025.171.84
12.	Real Estate	296.737.27	296.881.40
13.	Jasa Perusahaan	136.769.56	131.474.61
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan	735.998.49	762.286.41
15.	Jasa Pendidikan	1.259.867.22	1.307.202.33
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	175.541.64	192.862.95
17.	Jasa lainnya	282.027.39	267.858.85
18.	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	16.745.398.79	1.6527.211.18
19.	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS	16.745.398.79	1.6527.211.18

Sumber : Kota Kendari Dalam Angka Tahun 2021 (BPS Kota Kendari)

Kehadiran Jembatan Teluk Kendari sepanjang 1,34 Km di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara akan memberikan manfaat bagi pengembangan bagian selatan Kota Kendari yakni daerah Poasia dan Pulau Bungkutoko yang akan dikembangkan menjadi kawasan permukiman, kawasan industri dan pelabuhan Kendari New Port. Disamping itu juga akan meningkatkan konektivitas jalan nasional dan jalan lingkar luar Kota Kendari.

Pembangunan infrastruktur jembatan, flyover dan underpas akan memperlancar konektivitas dan aksesibilitas lalu lintas, disamping memberikan alternatif bagi warga untuk meningkatkan produktivitas perekonomian.

Dengan konektivitas yang semakin lancar diharapkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah sehingga dapat membantu proses percepatan pembangunan di wilayah tersebut.

Pembangunan kawasan pelabuhan di Pulau Bungkutoko menjadi bagian pengembangan Kota Kendari dengan dibangunnya Pelabuhan New Port Bungkutoto (66 Ha) yang merupakan pindahan dari pelabuhan lama di kawasan Kota Lama. Pelabuhan Bungkutoto menjadi pintu masuk bagi komoditi dari dan ke luar Kota Kendari maupun Provinsi Sulawesi Tenggara. Selain pelabuhan, juga akan dibangun kawasan industri penunjang (26 Ha), tracking mangrove (24 Ha), terminal antar moda (20 Ha), terminal multipurpose (32 Ha), dan terminal penumpang (23 Ha).

1.2. Perkembangan Penerimaan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen pendapatan daerah yang digunakan dalam membiayai belanja daerah. PAD memainkan peranan penting dalam pembiayaan dan merupakan salah satu indikator kemandirian daerah. Oleh karena itu, upaya untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor PAD harus dilakukan oleh setiap pemerintah daerah.

Dilihat dari *trend* kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kota Kendari, pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 14,29%, tahun 2019 juga mengalami peningkatan sebesar 16,36%, dan tahun 2020 menunjukkan peningkatan di mana mengalami kenaikan sebesar 17,61%.

Secara detail kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kota Kendari selama 3 (tiga) tahun tersaji pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.2

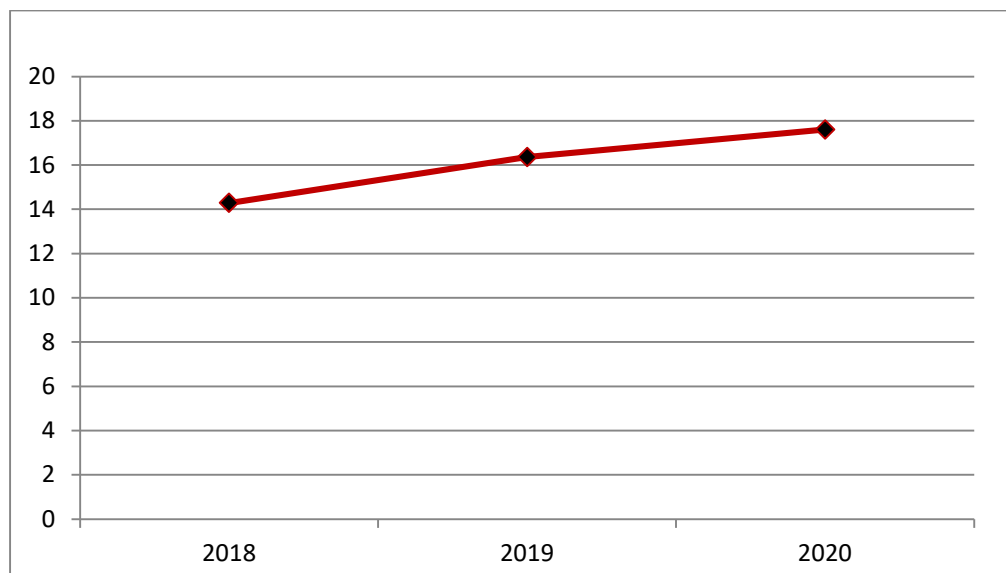
Trend Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari Tahun 2018 s/d Tahun 2020

No.	Tahun	Total PAD	Total Pendapatan	% PAD Terhadap Total Pendapatan
1.	2018	176.116.069.072,85	1.232.806.862.310,85	14,29%
2.	2019	215.330.974.788,06	1.315.816.539.184,06	16,36%
3.	2020	221.823.160.959,05	1.259.934.479.368,05	17,61%

Sumber : BKAD Kota Kendari

Grafik 1.2

Trend Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari Tahun 2018 s/d Tahun 2020



1.3. Kebijakan Pemerintah daerah dalam Mendorong Perekonomian dan Fiskal Daerah

Pandemi covid-19 berdampak secara signifikan pada perekonomian Kota Kendari. Berbagai dampak ekonomi yang dirasakan akibat pandemi ini, antara lain terganggunya stabilitas ekonomi nasional dan daerah, yaitu melambatnya roda perputaran ekonomi masyarakat, menurunnya pendapatan dan daya beli masyarakat. Selain itu, meningkatnya harga barang kebutuhan pokok, banyaknya pekerja UKM atau karyawan swasta yang

dirumahkan atau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan rendahnya transaksi jual beli di berbagai sektor.

Menyikapi berbagai dampak tersebut, pemerintah pun mengambil beberapa langkah luar biasa dan kebijakan strategis yang diharapkan dapat menanggulangi dampak kelesuan ekonomi melalui program pemulihan ekonomi nasional. Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang bertujuan memberikan produktivitas masyarakat dan membuat kondisi perekonomian bangsa kembali bergairah seperti sektor industri dan perdagangan yang mengalami kelesuan untuk kembali beroperasi sebagaimana mestinya. Selain itu, PEN juga menjadi salah satu upaya untuk mendorong seluruh pelaku usaha utamanya kelangsungan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Sebagai bentuk keseriusan Pemerintah membantu pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk bisa produktif, maka pemerintah memberikan bantuan stimulus dengan harapan bisa kembali bangkit meskipun di tengah COVID-19. Sebanyak 12.428 pelaku UMKM di Kota Kendari yang terdampak pandemi COVID-19 telah menerima bantuan stimulus pemulihan ekonomi nasional (PEN) dari pemerintah pusat.

Selain bantuan modal usaha, pelaku usaha mikro kecil dan menengah di kota itu juga diharapkan agar memiliki mental bisnis yang kuat sehingga mampu bertahan dan bangkit meskipun di tengah pandemi COVID-19. Yang mahal dari sebuah bisnis itu adalah bukan apa usahanya, bagaimana bentuk usahanya dan sebesar apa usahanya, tetapi yang paling mahal dari bisnis itu adalah mental bisnis yang kokoh dalam jiwa setiap pelaku UMKM. Dengan memiliki mental bisnis yang kuat maka para pelaku UMKM tidak akan mudah goyang dan akan selalu mampu untuk berinovasi dalam menciptakan produk yang memiliki daya saing sehingga usaha apapun yang dijalankan tidak akan meras kesulitan tetapi akan tumbuh dan maju. Dalam mendukung UMKM agar bisa tumbuh di tahun 2021, maka pemerintah kota Kendari menyediakan izin yang mudah, kedua membuka akses permodalan, ketiga menjaga atmosfer bisnisnya agar tumbuh dan terus terjaga. Hal itu penting, sehingga para pelaku UMKM bisa tumbuh berkembang tidak hanya dari mikro terus menjadi UMKM tetapi bisa menjadi pengusaha yang maju.

Di masa pandemi saat ini, pemanfaatan digitalisasi dinilai merupakan langkah yang tepat baik dalam pemasaran produk maupun ketika ingin bertransaksi jual beli, guna menghindari ataupun mengantisipasi penyebaran COVID-19.

Hadirnya teknologi membantu untuk mendapatkan informasi lebih cepat dan lebih luas serta kita bisa menginformasikan aktivitas bisnis kepada semua orang, terlebih lagi pemerintah telah berkomitmen untuk menggratiskan izin usaha bagi UMKM. Penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) sebagai metode pembayaran. Berdasarkan data historis pemilik QRIS, program-program nasional elektronikasi serta integrasi dan digitalisasi keuangan, ia melihat potensi digitalisasi Sultra sangat besar sehingga diperkirakan pengguna QRIS dapat tumbuh dua kali lipat dari tahun 2020. Pemanfaatan metode pembayaran digital menggunakan QRIS memiliki banyak keunggulan dimana QRIS bisa menjadi ujung tombak dalam mendorong digitalisasi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) agar semakin inklusif.

Saat ini, pelaku UMKM harus mampu bertransformasi sesuai dengan kondisi di lapangan. Termasuk dari segi pemasaran dan pembayaran yang dituntut secara digital. Masyarakat dituntut mengurangi interaksi secara langsung, sehingga kondisi pelaku bisnis diharapkan bisa beradaptasi dengan memanfaatkan QRIS sebagai metode pembayaran guna mendukung usahanya.

Strategi pemulihan ekonomi Kota Kendari untuk menanggulangi dampak Covid-19 yang terbagi dalam 3 pokok penguatan, yaitu penguatan penerapan protokol Kesehatan, penguatan ekonomi riil masyarakat melalui penciptaan *demand* bagi semua produk dengan konsep digitalisasi ekonomi, serta penguatan konsep kebaruan (*new normal*) dalam kegiatan ber-ekonomi masyarakat di masa yang akan datang dengan konsep digitalisasi ekonomi. Implementasi protokol kesehatan disusun untuk semua lini kehidupan bermasyarakat dengan pemanfaatan teknologi, sehingga masyarakat Kota Kendari akan lebih siap menyambut kebangkitan ekonomi setelah pandemi Covid-19 berakhir. Konsep digitalisasi ekonomi merupakan implementasi dari program penyebarluasan teknologi informasi dimana masyarakat Kota Kendari bekerja bersama dan bergotong royong

untuk menghadapi masa krisis selama pandemi covid-19. Implementasi konsep digitalisasi ekonomi untuk semua. Digitalisasi ekonomi akan menjadi salah satu kebijakan peningkatan ekonomi Kota Kendari.

2. PERKEMBANGAN ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH

Pemerintah Pusat melalui Nota Kesepahaman antara Kementerian Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Bank Indonesia pada tanggal 13 Februari 2020 mendorong pemerintah daerah untuk membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Pembentukan tim tersebut bertujuan untuk memperkuat efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara, mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, baik kecepatan transaksi keuangan, dan transparansi, serta mencegah kebocoran pelayanan publik.

Menindaklanjuti arahan Pemerintah Pusat tersebut, pada tanggal 9 februari 2021 Pemerintah Kota Kendari telah membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah melalui Keputusan Wali Kota Kendari Nomor 130 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kota Kendari. Kemudian SK revisi pada tanggal 27 desember 2021 nomor 1119 tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kota Kendari.

Adapun tujuan dari dibentuknya TP2DD tersebut adalah mempercepat pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETP). ETP menuntut perubahan transaksi pembayaran, yaitu dari sistem tunai (manual) menjadi non tunai (belanja dan pendapatan daerah). Di Pemerintah Kota Kendari hampir semua transaksi pembayaran belanja telah dilakukan secara non tunai dari bendahara kepada pihak penerima dengan *Cash Management System* (CMS) dan penerimaan pendapatan dari Wajib Retribusi (WR) maupun Wajib Pajak (WP) diupayakan tidak lagi melalui petugas pungut dan bendahara, melainkan melalui bank persepsi atau penyelenggara jasa sistem pembayaran yang ditunjuk sebagai kanal pembayaran resmi.

Sebagai dukungan terhadap Visi Kota Kendari untuk mewujudkan kota layak huni yang berbasis ekologi, informasi dan

teknologi dan misi meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, yang kaitannya dalam rangka perluasan ekelektronifikasi transaksi pemerintah daerah pada sektor pendapatan.

Dengan menggandeng Bank Sultra, Pemerintah Kota Kendari kembali membuat gebrakan baru melalui program “Pajak menyapa” (Jakpa). Jakpa merupakan layanan publik untuk pembayaran pajak dengan berbasis teknologi digital E-PBB, E-BPHTB dan E-SPTPD yang memudahkan masyarakat dalam memenuhi pajaknya. Dikemas dengan berbagai kemudahan akses, transparansi dan akuntabilitas untuk pencegahan Praktek Suap Pungli dan Gratifikasi (SPG), cukup dengan mengakses portal jakpa.kendarikota.go.id.

Jakpa ini diawali dengan layanan pembayaran pajak PBB dan selanjutnya dikembangkan lagi dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal memenuhi kewajiban pembayaran pajak lainnya seperti pajak Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta beberapa jenis pajak yang dikelola oleh Pemerintah Kota Kendari yang terdiri atas :

1) Pajak Hotel

Objek dari pajak ini adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang dan fasilitas olahraga serta hiburan.

2) Pajak Restoran

Objek pajak ini adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran, yang meliputi meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain

3) Pajak Hiburan

Objek pajak ini adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran

4) Pajak Reklame

Objek pajak ini adalah semua penyelenggara reklame, yaitu reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya; reklame kain; reklame melekat, stiker; reklame selebaran; reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; reklame udara; reklame apung; reklame suara; reklame film/slide; dan reklame peragaan.

5) Pajak Penerangan Jalan

Objek dari pajak ini adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Objek pajak ini adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam yang meliputi marmer, pasir dan kerikil, tanah liat, batu kapur, batu tulis, batu apung, dan sebagainya.

7) Pajak Parkir

Objek dari pajak ini adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

8) Pajak Air Tanah

Objek dari pajak ini adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah, kecuali untuk keperluan rumah tangga, pertanian dan perikanan rakyat, dan peribadatan.

9) Pajak Sarang Burung Walet

Objek dari pajak ini adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Pemerintah Kota Kendari bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk penggunaan QRIS melalui aplikasi linkaja. Ini sudah diterapkan diretribusi pariwisata pantai Nambo, kalau ke Nambo sekarang dilakukan dengan typing retribusi masuk atau gazebo. Penerapan QRIS juga sudah dilaksanakan pada pemungutan retribusi kali Kadia serta sewa bus Translulo, retribusi Penggunaan Kekayaan Daerah (PKD) tambat labuh, retribusi PKD Kendari beach dan pemungutan pajak warung. Kemudian menyusul lagi pajak dan retribusi lainnya yang menjadi kewenangan Pemkot Kendari. Secara bertahap penyediaan kanal pembayaran digital akan terus dikembangkan baik menggunakan Virtual Account, QRIS maupun pada aplikasi linkaja, sehingga pada akhirnya elektronifikasi transaksi pendapatan dapat terimplementasi pada seluruh jenis pajak dan retribusi di Kota Kendari.

Aplikasi SIM-RS PMCC Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Kendari adalah aplikasi Sistem Informasi Manajemen Private Medical Care Center(Pusat perawatan medis pribadi) yang mencakup semua

pelayanan kesehatan di semua tingkatan. Diharapkan dengan diterapkannya sistem ini mampu memberikan informasi yang akurat tentang perawatan medis kepada pengelola dan pasien, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik.

Selain itu juga Pemerintah Kota Kendari bersama Bank Indonesia Sulawesi Tenggara terus mendorong penggunaan transaksi non tunai dengan metode QRIS di pasar tradisional, dengan ditandai dengan dilaunchingnya elektronifikasi transaksi pasar (Daa) digital yang diberlakukan di 6 (enam) pasar di Kota Kendari pada Bulan April 2022 lalu.

3. KONDISI GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS WILAYAH

➤ Letak Geografis

Kota Kendari merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara, secara astronomi terletak di bagian selatan garis khatulistiwa berada di antara 3°54'40" - 4°5'05" Lintang Selatan (LS) dan membentang dari Barat ke Timur diantara 122°26'33" - 122°39'14" Bujur Timur(BT).

Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Kendari memiliki batas-batas :

- Sebelah Utara - Kabupaten Konawe
- Sebelah Timur - Laut Kendari
- Sebelah Selatan - Kabupaten Konawe Selatan
- Sebelah Barat - Kabupaten Konawe

Berdasarkan letak geografisnya, wilayah Kota Kendari terletak di bagian Tenggara Pulau Sulawesi. Wilayah daratannya terdapat di daratan Pulau Sulawesi mengelilingi Teluk Kendari.

Luas wilayah daratan Kota Kendari 27,76 km² atau 0,7 persen dari luas daratan Provinsi Sulawesi Tenggara.

➤ Demografi Wilayah

▪ Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kota Kendari pada tahun 2020 sebanyak 345.107 jiwa dan tersebar di 11 (sebelas) Kecamatan. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.

Jumlah Penduduk Kota Kendari
Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribu)
1.	Mandongga	37,22
2.	Baruga	33,29
3.	Puuwatu	40,00
4.	Kadia	36,61
5.	Wua-Wua	33,45
6.	Poasia	40,66
7.	Abeli	17,19
8.	Kambu	24,72
9.	Nambo	11,17
10.	Kendari	28,58
11.	Kendari Barat	42,23
Jumlah		345,11

Sumber : Kota Kendari Dalam Angka Tahun 2021, BPS Kota Kendari

▪ **Laju Pertumbuhan Penduduk**

Untuk laju pertumbuhan penduduk Kota Kendari pertahun 2010 – 2020 sebesar 1,70% untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3,2.

Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Kendari
Per Tahun 2010 – 2020

No.	Kecamatan	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
1.	Mandongga	0,28
2.	Baruga	5,38
3.	Puuwatu	3,60
4.	Kadia	-0,67
5.	Wua-Wua	3,10
6.	Poasia	4,83
7.	Abeli	2,21
8.	Kambu	-0,90
9.	Nambo	4,73
10.	Kendari	1,09
11.	Kendari Barat	-0,16
Jumlah		1,70

Sumber : Kota Kendari Dalam Angka Tahun 2021, BPS Kota Kendari

▪ **Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin**

Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3.

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2020

No.	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	0 - 4	16.707	16.548	33.255
2.	5 - 9	16.220	15.607	31.827
3.	10 - 14	15.631	14.536	30.167
4.	15 - 19	15.095	14.297	29.392
5.	20 - 24	15.845	16.018	31.863
6.	25 - 29	16.455	16.709	33.164
7.	30 - 34	15.860	15.629	31.489
8.	35 - 39	14.104	13.946	28.050
9.	40 - 44	12.330	12.222	24.552
10.	45 - 49	9.937	10.071	20.008
11.	50 - 54	8.052	8.419	16.471
12.	55 - 59	7.037	6.596	13.633
13.	60 - 64	4.725	4.406	9.130
14.	65 - 69	3.141	2.994	6.135
15.	70 - 74	1.643	1.631	3.274
16.	75+	1.205	1.492	2.697
Jumlah		173.987	171.120	345.107

Sumber : Kota Kendari Dalam Angka Tahun 2021, BPS Kota Kendari

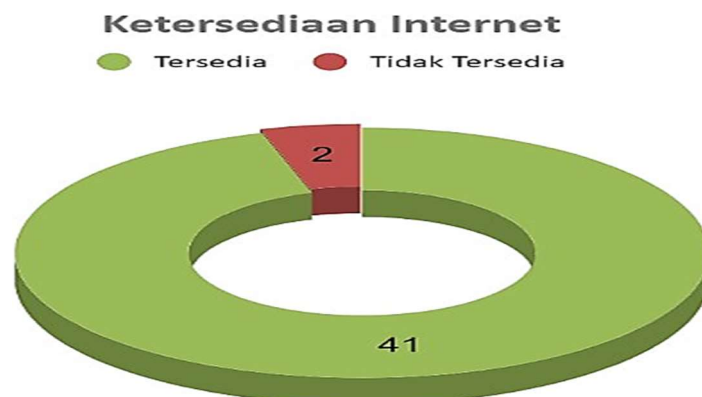
II. ASSESMENT EKONOMI DAN SISTEM PEMBAYARAN DI DAERAH

1. Gambaran Infrastruktur Telekomunikasi

a) Jaringan Internet

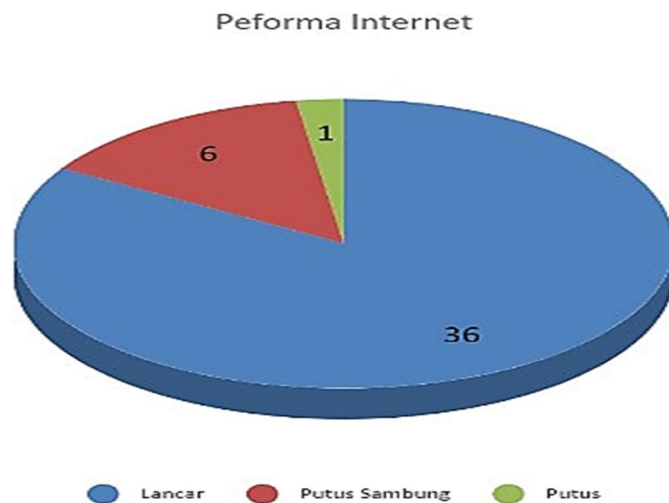
Jaringan Internet di Kota Kendari sudah tersedia di hampir seluruh pelosok. Sehingga setiap OPD sudah memiliki jaringan internet untuk menunjang pekerjaan. Dari Grafik 3.1, hampir keseluruhan OPD di Pemerintah Kota Kendari telah memiliki koneksi internet. Dimana ketersediaan internet sudah hampir 100%. Beberapa OPD tidak memiliki jaringan internet karena kendala teknis.

Grafik. 1.1. Ketersediaan Internet di OPD



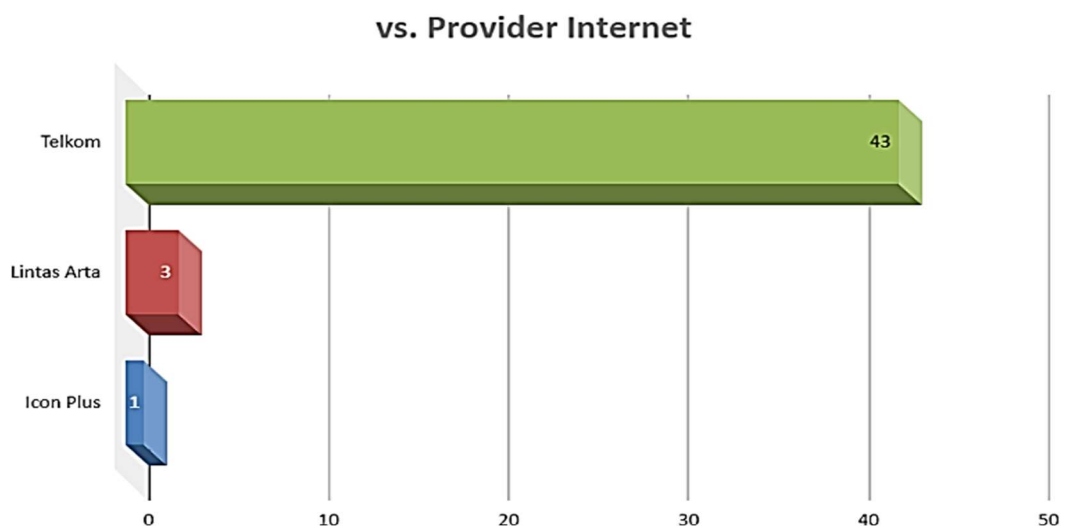
Pada sisi performa, sebagian besar OPD, yakni 84% atau 36 OPD menyatakan performa internet lancar, sedangkan 14% atau 6 OPD menyatakan performa internet putus sambung. Sedangkan ada 2% atau 1 OPD yang menyatakan jaringan internetnya putus

Grafik. 1.2. Performa internet OPD



Upaya perbaikan koneksi internet yang bermasalah pada 7 OPD perlu dilakukan untuk memastikan implementasi aplikasi-aplikasi di masa mendatang dapat berjalan dan digunakan dengan baik.

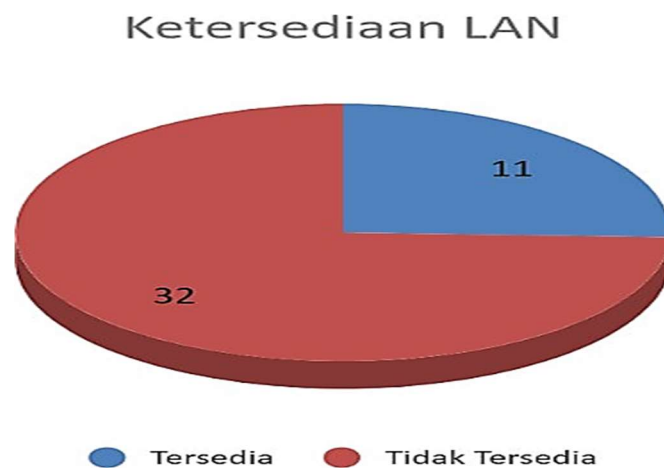
Grafik. 1.2. Provider internet OPD



b) LAN

Dengan semakin cepatnya koneksi internet di Indonesia, kebutuhan LAN di area perkantoran saat ini lebih kepada memberikan efisiensi dan privasi dalam proses kerja di internal OPD. Selain itu, jaringan LAN dapat memproses pertukaran file (*file sharing*), mempermudah proses penggunaan perangkat pendukung secara bersama-sama (*printer dan scanner sharing*) serta mempermudah proses manajemen koneksi internet pada OPD.

Grafik. 1.3. Ketersediaan LAN

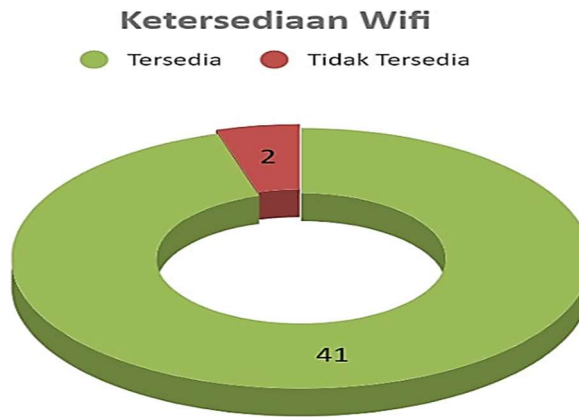


Berdasarkan hasil survei, sebesar 74,4% atau 32 OPD belum memiliki jaringan LAN, ini menjadi perhatian khusus untuk tim pengelola jaringan di Pemerintah Kota Kendari untuk melakukan penambahan jaringan LAN di setiap OPD yang belum memiliki jaringan LAN.

c) WIFI

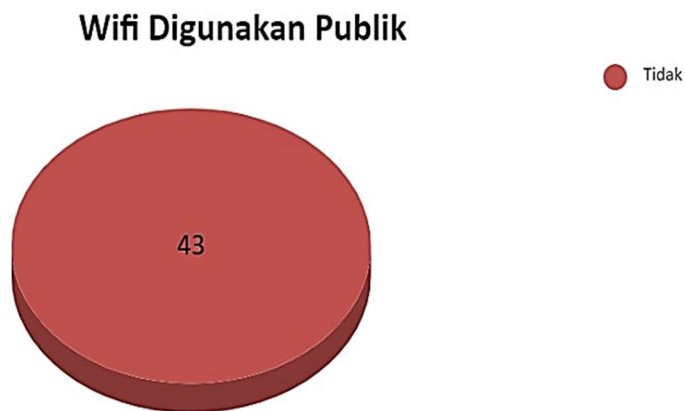
Dengan meningkatnya penggunaan perangkat *portable* seperti laptop dan smartpone, wifi menjadi salah satu alternatif utama untuk memenuhi kebutuhan internet. Hasil survei memperlihatkan bahwa 41 OPD telah menyediakan jaringan wifi.

Grafik. 1.4. Ketersediaan Wifi di OPD



Yang perlu menjadi perhatian adalah seluruh OPD termasuk OPD dalam sektor pelayanan publik belum menyediakan akses wifi bagi masyarakat (*public connection*). Seluruh OPD menyatakan menyediakan jaringan wifi hanya untuk kebutuhan internal OPD.

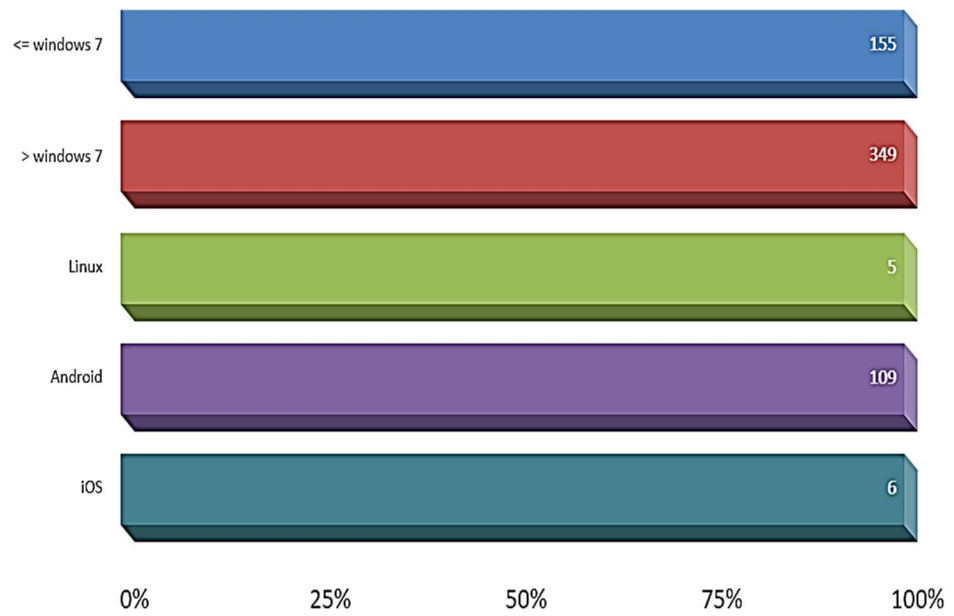
Grafik. 1.5. Penyediaan Wifi Publik



d) Perangkat TIK

Pada dasarnya, ketersediaan perangkat yang terhubung dengan internet, menjadi salah satu penunjang utama dalam mendorong terciptanya Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik yang efektif dan efisien. Perangkat yang terdiri dari atas PC, Laptop dan Smartphone berjumlah 1.328 dengan kategori sistem operasi yang digunakan sebagai berikut :

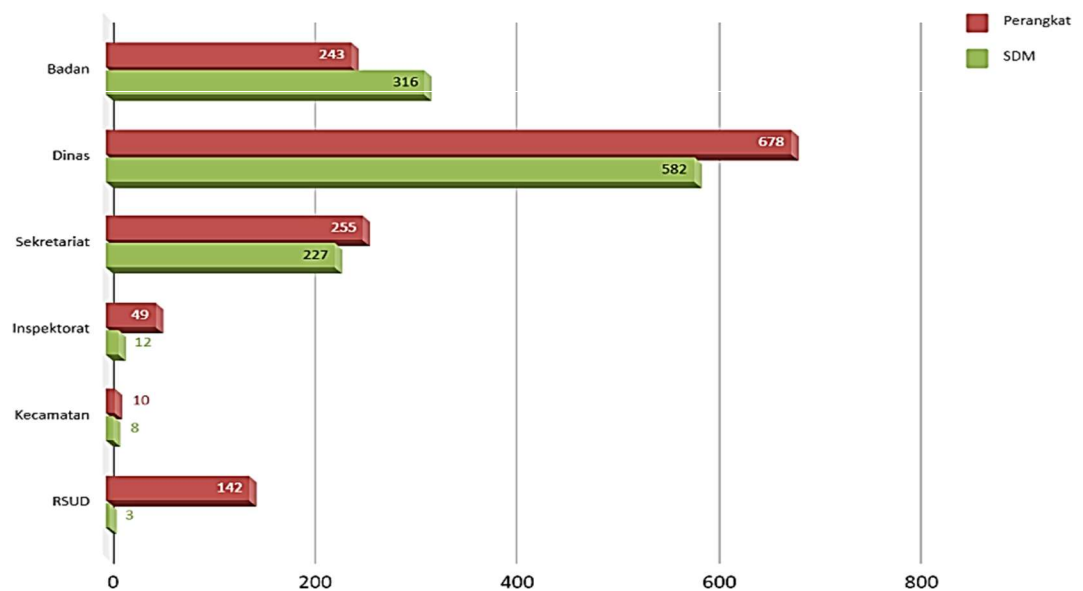
Grafik. 1.5. Klasifikasi OS



Dari total 1.328 perangkat yang ada, sebagian besar (349) menggunakan sistem operasi diatas windows 7, sedangkan sebanyak 155 perangkat menggunakan windows 7, hal ini perlu dijadikan perhatian dikarenakan Microsoft sudah menghentikan support untuk windows 7 sehingga perlu dilakukan *upgrading* sistem operasi terhadap perangkat-perangkat tersebut.

Di sisi lain terdapat 5 perangkat yang menggunakan sistem operasi linux, 109 perangkat menggunakan sistem operasi android dan ada 6 perangkat menggunakan sistem operasi iOS.

Grafik. 1.6. Persebaran Perangkat di OPD



Pada grafik persebaran diatas, menunjukkan perbandingan antara jumlah perangkat dan jumlah SDM yang memiliki *basic* IT di setiap OPD, untuk mengidentifikasi adanya kesenjangan antara jumlah perangkat dengan pengguna. Pada klaster Dinas, Sekretariat, Kecamatan dan RSUD jumlah perangkat sudah cukup memadai

Grafik. 1.7. Jumlah Perangkat Pendukung



Perangkat Pendukung yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Kendari adalah IP Base CCTV sebanyak 81% atau 186 unit, Finger Print sebanyak 12% 33 unit dan public smart TV sebanyak 7% atau 15 unit.

2. Sistem Informasi

a) Sistem Informasi yang sudah berjalan

Sesuai hasil survey, terdapat 95 aplikasi atau sistem informasi yang digunakan oleh OPD di Pemerintah Kota Kendari. Daftar sistem informasi yang sedang berjalan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.1. Aplikasi yang Sudah Berjalan

NO.	NAMA APLIKASI	DESKRIPSI
1.	SIMDA Pendapatan	Pengelolaan administrasi pendapatan daerah
2.	SIP PBB	Pengelolaan PBB
3.	SIP BPHTB	Pengelolaan BPHTB
4.	SIPD	Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, Pelaporan Keuangan
5.	ONSPAM	Progres Keuangan DAK
6.	LAPOR SPAN	Pelaporan Aduan Masyarakat
7.	KUSUKA	Data Perikanan (KUB, Nelayan)
8.	VALIDASI SATU DATA	Data Statistik Perikanan
9.	TEMAN SPB	Pelayanan
10.	E.LOG BOOK	Pelayanan Log Book Kapal Perikanan
11.	DAERAH < 30 GT	Pelayanan Pendapatan Kapal Nelayan < 30 GT
12.	PIPP	Pelayanan Informasi Kepelabuhanan
13.	SIMKADA	Bukti Pencatatan Kapal < 10 GT
14.	E-Humas	Pengaduan Masyarakat
15.	KRISNA DAK (kolaborasi perencanaan dan informasi kinerja anggaran dana alokasi khusus)	Apk Perencanaan DAK kolaborasi Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenkeu RI
16.	Aplikasi E-Renggar	Apk. Perencanaan, Penganggaran dan monitoring evaluasi dari biro perencanaan dan anggaran kemenkes
17.	Aladin (Aplikasi Pelaporan DAK Non Fisik)	Apk. penyampaian laporan penyerapan DAK non fisik dari kemenkeu RI
18.	SPAN (Online Monitoring - Sistem Perbendaharaan dan Anggaran)	Apk. pemantauan transaksi dalam sistem perbendaharaan dan anggaran dari ditjen perbendaharaan Kemenkeu RI
19.	Simlaras (Sistem Informasi Penyelaras Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah)	Apk. yang digunakan untuk mengusulkan kegiatan yang mendukung perencanaan pemerintah pusat dan daerah untuk tercapainya keselarasan pembangunan nasional (BAPPENAS)
20.	KOMDAT (Komunikasi Data)	Apk. pengumpulan data dan informasi kesehatan secara berkala dari Pusdatin Kemenkes RI
21.	SIKDA GENERIK (Sistem Informasi Kesehatan Daerah)	Sistem informasi kesehatan yang mengintegrasikan sistem-sistem informasi di puskesmas, rumah sakit, dan sarana kesehatan lainnya

NO.	NAMA APLIKASI	DESKRIPSI
22.	ASDK/DHIS2 (Aplikasi Satu Data Kesehatan/ District Health Information	Apk. pengumpulan data dan informasi kesehatan secara berkala dari Pusdatin Kemenkes .RI secara visualisasi data dalam bentuk grafik
23.	Software) Si Asik	Apk Berbasis Website
24.	Sehat STBM (Aplikasi AKses Jaga)	Pelaporan JAmban Keluarga
25.	Aplikasi Tempat Pengolahan Makanan (TPM)	Pelaporan TPM
26.	Aplikasi Pengawasan Air (PKAM)	Pelaporan Air Minum
27.	Aplikasi Keluarga Sehat (PIS-PK)	Apk. Pendataan keluarga sehat dari Pusdatin Kemenkes RI
28.	SPGDT (PSC 119)	Apk. Sistem Penanganan Kegawatdaruratan
29.	SIMADA (Sistem Informasi Manajemen Data Kefarmasian dan DAK Kefarmasian)	Pelaporan Data Sarana Pelayanan Kefarmasian, Data Tenaga Farmasi, DAK Kefarmasian dan Data Instalasi Farmasi
30.	SIPNAP (Sistem Informasi Pelaporan Narkotik Psikotropika)	Pelaporan Pemakaian Narkotika dan Psikotropika di Sarana Pelayanan Kefarmasian
31.	E-desk DAK	Sistem Informasi Rencana Kerja Anggaran Terpadu
32.	Smartpom	Aplikasi pengawasan Obat dan Makanan serta monitoringnya
33.	Aplikasi SPP-IRT (Pendataan & Pelaporan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga)	Data Sarana Indutri Rumah Tangga Pangan
34.	ASPAK	Aplikasi Sarana Prasarana Alat Kesehatan
35.	Aplikasi Renbut (Rencana Kebutuhan)	Aplikasi Data dan Informasi tentang perhitungan jumlah formasi tenaga kesehatan
36.	SIS-SDMK	Aplikasi data jumlah sebaran tenaga kesehatan
37.	Aplikasi Nusantara Sehat	Aplikasi Khusus Penugasan Tenaga Kesehatan
38.	Aplikasi E.UKOM	Aplikasi Sistem Informasi Uji KOMPetensi
39.	Aplikasi Impassing	Aplikasi kenaikan pangkat fungsional
40.	SITT (Sistem Informasi Tuberkolosis Terpadu)	Pelaporan TB
41.	SIHA (Sistem informasi HIV/AIDS)	Pelaporan HIV/AID dan IMS
42.	Sismal	Pelaporan Malaria
43.	SIPTM	Surveilans PTM
44.	SKDR Surveilans (Sistem Kewaspadaan Dini Respon)	Pelaporan W2 Kasus Penyakit
45.	Siskothatkes (Sistem Informasi Komputerasisasi Haji Terpadu Kesehatan)	Pelaporan Haji
46.	SiApik	Pengelolaan Data Pegawai, Arsip surat dan perizinan
47.	Aplikasi Antrian Online	Aplikasi yang memudahkan pemohon izin mengambil nomor atrian
48.	Simantap	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
49.	Si- TPPNS	Pengelolaan Penilaian Kinerja
50.	Absen Online	Pengelolaan Daftar kehadiran pegawai
51.	SAPK	Pengelolaan Kepegawaian Nasional
52.	EFormasi	Penyusunan perencanaan pegawai nasional

NO.	NAMA APLIKASI	DESKRIPSI
53.	SLKS	Pendataan satya lancana penghargaan PNS
54.	Web BKPSDM	Portal Informasi BKPSDM
55.	Si Japhi	Proses Laporan Penyelenggaraan JPT
56.	IPPNS	Informasi Indeks Profesionalitas PNS
57.	Si Pinter	Informasi penilaian mandiri penerapan sistem merit
58.	L2T2	Layanan terjadwal pengelolaan air limbah domestik kendari secara berkelanjutan
59.	Website Dinas Perlindungan Perempuan & PA	Pengelolaan data e-goverment tentang program dan kegiatan yang dilaksanakan dinas PPPA Kota Kendari untuk diakses oleh masyarakat
60.	Simfoni PPA (Sistem informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak	Pengelolaan data , monitoring dan evaluasi kasus kekerasan perempuan dan anak di Indonesia khususnya di Kota Kendari
61.	SIMDA Keuangan	Pengelolaan keuangan mulai dari penganggaran sampai pelaporan
62.	SIMDA BMD	Pengelolaan Barang Milik Daerah
63.	SIM TASPEN	Pengelolaan Data Pegawai terkait Pembayaran Gaji
64.	SIMSETGIS	Sistem Inventarisasi BMD dan Informasi Peta Digital Wilayah Aset Kota Kendari
65.	SIMPEL SP2D	Sistem Informasi Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana
66.	APLIKASI PERSEDIAAN	Pengelolaan Persediaan Barang
67.	SIP BOS	Perencanaan Kebutuhan Anggaran, Pengelolaan dan Penatausahaan Dana Bantuan Operasional Sekolah
68.	Vclaim	Pelayanan Pasien BPJS
69.	Eclaim	Tagihan Pasien BPJS
70.	SIM RS	Pelayanan Semua Pasien di RS
71.	SIRS	Pelaporan Pasien Covid-19
72.	SISMADAK	Pengelolaan Data Pegawai Akreditasi RS
73.	ASPAK	Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan
74.	PPBD Online	Penerimaan peserta didik baru
75.	Aplikasi SARPRAS	pendataan Sappras Pendidikan
76.	SAKIP	Pengelolaan SAKIP
77.	SIIP	Pengelolaan Data PMPRB
78.	SIMONA	Pengelolaan Data Anjab
79.	PMPRB	Pengelolaan Data PMPRB
80.	E-FORMASI	Pengelolaan Data Formasi Penyusunan CPNS
81.	SINOVIK	Pengelolaan Data Informasi Inovasi PP
82.	SPPD Elektronik	Membuat surat perjalanan dinas elektronik
83.	SIMPER	Surat elektronik
84.	SPSE	Sistem Pengadaan Secara Elektronik

NO.	NAMA APLIKASI	DESKRIPSI
85.	SiRUP	Sistem Inormasi Rencana Umum Pengadaan
86.	Monev LKPP	Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Anggaran PBJ
87.	SiULP	Sistem Informasi Unit Layanan Pengadaan
88.	LAYANAN INTEGRASI KENDARI (LAIKA)	Memudahkan Pelayanan Masyarakat Kota Kendari di tingkat kelurahan
89.	Lapor SP4N	Aplikasi Aduan masyarakat terhadap kinerja pemerintah Kota Kendari
90.	LHKPN	Pengelolaan data harta kekayaan penyelenggara Negara
91.	SIPTL	Pengelolaan data pemantauan tindak lanjut
92.	Jari (Jaga Kendari)	Pengelolaan data informasi pelayanan kependudukan
93.	UPG	Pengelolaan data pelaporan gratifikasi ASN Pemerintah Kota Kendari
94.	jari	Pengelolaan data monitoring centre for prevention (MCP)
95.	Diklat BPKP	Penginputan data auditor yang akan mengikuti diklat pembentukan, Penjenjangan, Subtantif

Sumber : Rencana Induk SPBE Kota Kendari Tahun 2021 - 2025

Analisa terhadap kondisi aplikasi yang sedang berjalan dapat dijabarkan sebagai berikut :

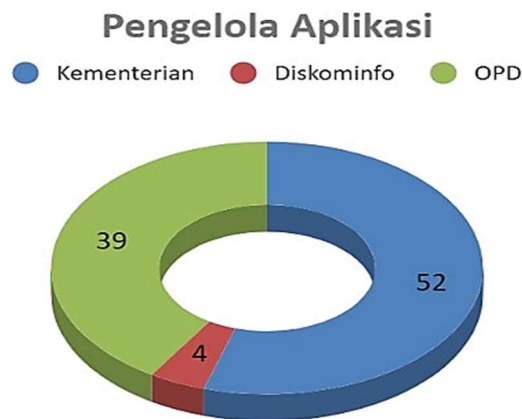
Grafik. 2.1. Penggunaan Aplikasi



Pada grafik yang tertera di atas, menunjukkan bahwa, 68 aplikasi yang saat ini berjalan, 71,6% atau 68 aplikasi adalah aplikasi yang hanya digunakan oleh OPD tertentu, sedangkan 28,4% atau 27 aplikasi adalah aplikasi yang sudah digunakan oleh beberapa OPS atau seluruh OPD di Kota Kendari.

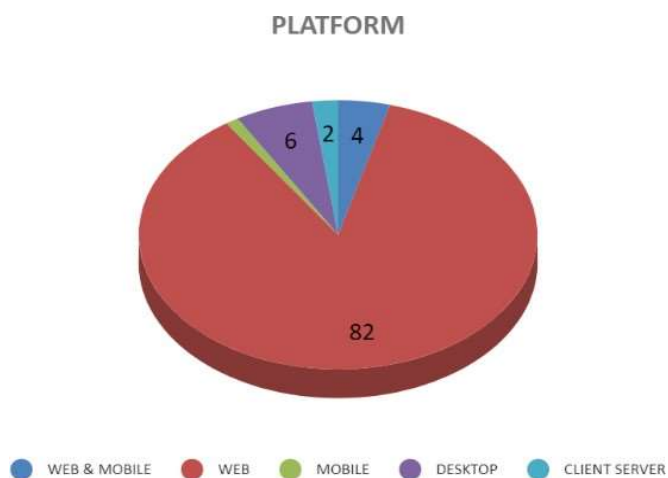
Sementara dari sisi pengelola aplikasi, Aplikasi yang dikelola oleh Pusat atau Kementerian masih mendominasi dengan 54,7% atau sebanyak 52 aplikasi, OPD di Kota Kendari juga banyak yang mengelola aplikasi dengan 41,1% atau sebanyak 39 aplikasi, sementara terdapat 4 aplikasi atau 4,2% aplikasi yang telah dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari.

Grafik. 2.2. Pengelola Aplikasi



Dengan adanya 4 aplikasi yang telah dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari, menunjukkan bahwa kesiapan awal Diskominfo untuk mengelola seluruh aplikasi yang berjalan di Kota Kendari sudah terlihat. Dimana langkah selanjutnya adalah menyusun standarisasi pengembangan aplikasi, baik dari sisi kebutuhan perencanaan, teknologi, standarisasi proses pengembangan aplikasi maupun standar pemeliharaan aplikasi yang tengah berjalan.

Grafik. 2.3. Klasifikasi Platform Aplikasi



Dalam hal distribusi platform aplikasi, web base mendominasi dengan 82 Aplikasi atau 86,3% dari seluruh aplikasi yang berjalan, 4 aplikasi berjalan di web dan mobile, 1 aplikasi berjalan di mobile, 6 aplikasi berjalan di platform desktop, dan ada dua aplikasi yang merupakan platform client server.

3. Gambaran Bank RKUD

3.1. Produk Layanan NonTunai Yang Dimiliki Bank RKUD

Bank Pengelola RKUD Bank Sultra memiliki berbagai produk layanan non-tunai diantaranya :

- a) Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)
- b) SP2D Online (belanja modal)
- c) Satker Online (belanja rutin)
- d) SMS Banking (antar rekening Bank Sultra)
- e) Kartu Debit (berlaku bulan Mei 2022)

3.2. Jumlah Infrastruktur Bank Pengelola RKUD

Bank Sultra saat ini memiliki jaringan layanan yang tersebar di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara dengan rincian sebagai berikut :

- a) 1 Kantor Pusat
- b) 14 Kantor Cabang
- c) 4 Kantor Cabang Pembantu
- d) 71 Kantor Kas
- e) 5 Payment Point
- f) 1 unit Kas Mobil
- g) 142 mesin ATM
- h) 1 ATM Drive Thru

Inisiasi infrastruktur yang telah dilakukan Bank Sultra dalam mendukung program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah antara lain pengembangan Host to Host dengan jaringan yang dimiliki pemerintah, integrasi sistem keuangan pemerintah daerah dan sistem bank serta pengembangan open banking melalui API (*Application Programming Interface*) sehingga memungkinkan perluasan channel dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) lainnya.

3.3. Kerja Sama yang Dimiliki Bank RKUD dalam Layanan Non Tunai

Bank Sultra memiliki kerjasama MoU tentang pengembangan digitalisasi Kota Kendari bersama Pemerintah Kota Kendari dan Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Bank Sultra juga menjalin kerja sama dengan pihak-pihak yang dapat memperluas jangkauan pembayaran digital. Dengan demikian, pembayaran pendapatan daerah dapat dilakukan melalui aplikasi-aplikasi tersebut, sehingga memungkinkan wajib pajak dan wajib retribusi yang berdomisili di luar wilayah Kota Kendari sekalipun tetap dapat memenuhi kewajibannya tanpa harus hadir langsung ke kantor layanan Bank.

4. Gambaran Pemerintah Daerah

4.1. Kebijakan/regulasi/program pemda dalam mendukung digitalisasi/SPBE dan ETPD

Pemerintah Kota Kendari mendukung penuh proses digitalisasi daerah khususnya bagi pemulihan ekonomi daerah. Beberapa kebijakan diambil untuk mendukung proses transformasi digitalisasi dan pemulihan ekonomi daerah.

Keberadaan regulasi pendukung elektronifikasi dan e-Government dimana Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETP) merupakan amanat pemerintah pusat melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai, yang ditindaklanjuti Pemerintah Kota Kendari melalui :

- 1) Peraturan Walikota Kendari Nomor 48 Tahun 2018 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai.
- 2) Peraturan Walikota Kendari Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kendari Nomor 48 Tahun 2018 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai.
- 3) Peraturan Walikota Kendari Nomor 41 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- 4) Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah melalui Keputusan Wali Kota Kendari Nomor 130 Tahun 2021 dan Keputusan Walikota Kendari nomor 1119 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kota Kendari.

4.2. Aplikasi atau sistem berbasis teknologi yang telah dibangun dalam mendukung digitalisasi dan elektronifikasi

Pemerintah Kota Kendari mendukung digitalisasi dan elektronifikasi dengan membangun beberapa aplikasi atau system berbasis teknologi :

- 1) Pemberian alternatif pembayaran dan optimalisasi dengan menggunakan QRIS.
- 2) Pemerintah Kota Kendari dalam mendukung percepatan dan perluasan digitalisasi, bekerja sama dengan LinkAja dengan tujuan mengakselerasi percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan transaksi nontunai di Kota Kendari.
- 3) Penerapan pelayanan pajak online melalui Portal Pajak Menyapa.

5. Tingkat Literasi Non Tunai Dan Digital Masyarakat

- 1) Tingkat literasi nontunai masyarakat Kota Kendari terus berkembang dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Kendari Nomor 48 Tahun 2018 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai dan Peraturan Walikota Kendari Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kendari Nomor 48 Tahun 2018 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai.
- 2) Tingkat literasi nontunai masyarakat Kota Kendari sudah cukup baik, terutama masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan. Terlihat dari penggunaan alat pembayaran nontunai seperti kartu debit, kartu kredit, uang elektronik dan QRIS oleh masyarakat di tempat-tempat perbelanjaan, restoran, café, hotel serta pembayaran pajak dan retribusi daerah.
- 3) Tingkat literasi digital masyarakat Kota Kendari secara umum masih perlu ditingkatkan. Sebenarnya hampir seluruh masyarakat di Kota Kendari sudah mengakses internet dan menggunakan internet pada kegiatan sehari-hari, namun penggunaan internet ini hanya sebatas mengakses informasi dan bermedia sosial bukan sebagai penggunaan produktif. Masih diperlukan upaya-upaya memanfaatkan teknologi digital terutama di sektor produktif agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

III. KENDALA DAN PERMASALAHAN

1. Gambaran Permasalahan dari Sisi Kanal dan/atau Instrument Pembayaran Non Tunai

No.	Jenis Kanal	Pemerintah Daerah	Masyarakat	Bank Sultra	Infrastruktur	Penyedia Jasa Pembayaran
1.	QRIS	<p>1. Untuk jenis Pajak Daerah sudah memiliki QRIS sebagai sarana pembayaran, tetapi sosialisasi kepada wajib pajak masih belum maksimal</p> <p>2. Untuk Retribusi Daerah belum seluruhnya memiliki QRIS sebagai alternatif pembayaran nontunai dan juga Sosialisasi kepada masyarakat belum optimal sehingga belum banyak dimanfaatkan</p>	<p>1. Masyarakat belum banyak yang memanfaatkan QRIS sebagai sarana pembayaran</p> <p>2. Masih menyukai membawa uang tunai</p> <p>3. Tidak semua masyarakat memiliki mobile banking</p>	Sosialisasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan QRIS sebagai sarana pembayaran kurang maksimal	<p>1. Jangkauan internet gratis terutama di OPD dan sarana publik kurang optimal;</p> <p>2. Jaringan 5G belum tersedia di Kota Kendari</p>	
2,	Teller		Mayarakat masih banyak malas untuk mengantri			
3,	ATM		Tidak semua masyarakat memanfaatkan ATM karena lebih memilih datang langsung ke Teller untuk mendapatkan bukti pembayaran dengan stempel bank.	<p>1. Perlu biaya yang cukup besar untuk menambah jumlah mesin ATM.</p> <p>2. Proses ijin pemasangan mesin ATM memakan waktu yang cukup lama.</p>		
4,	E-money	Belum seluruhnya memiliki linkaja sebagai alternatif pembayaran nontunai	Tidak semua masyarakat memanfaatkan linkaja karena lebih memilih datang langsung ke Teller untuk mendapatkan bukti pembayaran dengan stempel bank.	Sosialisasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan linkaja sebagai sarana pembayaran kurang maksimal		<p>1. Pembayaran tidak real time.</p> <p>2. Keterbatasan untuk melakukan transaksi karena LinkAja tidak bisa melakukan sejumlah transaksi dalam jumlah yang sangat besar. Karena Aplikasi ini didesain hanya untuk memudahkan kegiatan pembayaran dalam skala kecil.</p>

2. Gambaran Permasalahan dari sisi Jenis Pendapatan Daerah

No	Jenis Pendapatan dan Belanja	Faktor Permasalahan			
		Pemerintah Daerah	Bank RKUD	Masyarakat	Infrastruktur TIK
A. PAJAK DAERAH					
1.	Pajak Hotel	1. Kurangnya Monitoring dan Evaluasi dalam Pemanfaatan Kanal - Kanal Pembayaran Digital yang disediakan Bank dalam Proses Pembayaran Pajak Daerah.	1. Kurangnya Sosialisasi terkait Kanal - Kanal Pembayaran Digital yang dimiliki	1. Masyarakat yang Belum Mengenal Kanal - Kanal Pembayaran Pajak secara Digital.	Jaringan Telekomunikasi/ Internet yang belum merata di semua wilayah Kota Kendari
		2. Belum siapnya SDM dalam Pengelolaan Transaksi Digital dan Kurangnya Sosialisasi Kepada Masyarakat terkait Elektronifikasi Transaksi.	2. Belum membangun system untuk mengintegrasikan pembayaran ke non tunai	2. Karakteristik Masyarakat Kota Kendari yang terbiasa membayar Pajak melalui Teller.	
		3. Kurangnya Sosialisasi dan Penyuluhan terkait Pelaporan dan Pembayaran Pajak secara digital			
2.	Pajak Restoran	1. Kurangnya Monitoring dan Evaluasi dalam Pemanfaatan Kanal - Kanal Pembayaran Digital yang disediakan Bank dalam Proses Pembayaran Pajak Daerah.	1. Kurangnya Sosialisasi terkait Kanal - Kanal Pembayaran Digital yang dimiliki.	1. Masyarakat yang Belum Mengenal Kanal - Kanal Pembayaran Pajak Secara Digital.	Jaringan Telekomunikasi/ Internet yang belum merata di semua wilayah Kota Kendari
		2. Belum Siapnya SDM dalam Pengelolaan Transaksi Digital dan Kurangnya Sosialisasi Kepada Masyarakat Terkait Elektronifikasi Transaksi.		2. Kurangnya Pengetahuan Wajib Pajak Restoran Jenis Jasa Boga dan Catering dalam Kewajibannya Melaporkan dan Membayar Pajak Daerah.	
		3. Kurangnya Sosialisasi dan Penyuluhan Terkait Pelaporan dan Pembayaran Pajak Restoran dan warung		3. Karakteristik Masyarakat Kota Kendari yang Terbiasa Membayar Pajak melalui Teller.	
3.	Pajak Hiburan	1. Kurangnya Monitoring dan Evaluasi dalam	1. Kurangnya Sosialisasi terkait Kanal	1. Masyarakat yang Belum Mengenal	Jaringan Telekomunikasi/ Internet

		Pemanfaatan Kanal - Kanal Pembayaran Digital yang Disediakan Bank dalam Proses Pembayaran Pajak Daerah.	- Kanal Pembayaran Digital yang Dimiliki.	Kanal - Kanal Pembayaran Pajak Secara Digital.	yang belum merata di semua wilayah Kota Kendari
		2. Belum Siapnya SDM dalam Pengelolaan Transaksi Digital dan Kurangnya Sosialisasi Kepada Masyarakat Terkait Elektronifikasi Transaksi.	Karakteristik Masyarakat Kota Kendari yang terbiasa Membayar Pajak melalui Teller	2. Kurangnya Pengetahuan Wajib Pajak Restoran Jenis Jasa Boga dan Cattering dalam Kewajibannya Melaporkan dan Membayar Pajak Daerah.	
4	Pajak Reklame	1. Kurangnya Monitoring dan Evaluasi dalam Pemanfaatan Kanal - Kanal Pembayaran Digital yang Disediakan Bank dalam Proses Pembayaran Pajak Daerah.	1. Kurangnya Sosialisasi Terkait Kanal - Kanal Pembayaran Digital yang Dimiliki.	1. Masyarakat yang belum mengenal Kanal - Kanal Pembayaran Pajak Secara Digital.	Jaringan Telekomunikasi/ Internet yang belum merata di semua wilayah Kota Kendari
		2. Belum Siapnya SDM dalam Pengelolaan Transaksi Digital dan Kurangnya Sosialisasi Kepada Masyarakat Terkait Elektronifikasi Transaksi.		2. Karakteristik Masyarakat Kota Kendari yang terbiasa Membayar Pajak melalui Teller.	
5	Pajak Penerangan Jalan	Kurangnya Sosialisasi Kepada Wajib Pajak PPJ terkait Proses Perhitungan, Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah		Kurangnya Pemahaman Mengenai Proses Perhitungan, Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah.	Jaringan Telekomunikasi/ Internet yang belum merata di semua wilayah Kota Kendari
6	Pajak Parkir	1. Kurangnya Monitoring dan Evaluasi dalam Pemanfaatan Kanal - Kanal Pembayaran Digital yang disediakan Bank dalam Proses Pembayaran Pajak Daerah.	1. Kurangnya Sosialisasi Terkait Kanal - Kanal Pembayaran Digital yang Dimiliki.	1. Masyarakat yang belum mengenal Kanal - Kanal Pembayaran Pajak Secara Digital.	Jaringan Telekomunikasi/ Internet yang belum merata di semua wilayah Kota Kendari
		2. Belum Siapnya SDM dalam Pengelolaan Transaksi Digital dan Kurangnya Sosialisasi Kepada Masyarakat		2. Karakteristik Masyarakat Kota Kendari yang terbiasa Membayar Pajak melalui Teller.	

		Terkait Elektronifikasi Transaksi.			
7	Pajak Air Bawah Tanah	1. Kurangnya Monitoring dan Evaluasi dalam Pemanfaatan Kanal - Kanal Pembayaran Digital yang disediakan Bank dalam Proses Pembayaran Pajak Daerah.	1. Kurangnya Sosialisasi Terkait Kanal - Kanal Pembayaran Digital yang dimiliki.	1. Masyarakat yang Belum Mengenal Kanal - Kanal Pembayaran Pajak secara Digital.	Jaringan Telekomunikasi/ Internet yang belum merata di semua Wilayah Kota Kendari
		2. Belum siapnya SDM dalam Pengelolaan Transaksi Digital dan Kurangnya Sosialisasi Kepada Masyarakat Terkait Elektronifikasi Transaksi.		2. Karakteristik Masyarakat Kota Kendari yang terbiasa membayar Pajak melalui teller	
8	Pajak Sarang Burung Walet	1. Kurangnya Monitoring dan Evaluasi dalam Pemanfaatan Kanal - Kanal Pembayaran Digital yang Disediakan Bank dalam Proses Pembayaran Pajak daerah.	1. Kurangnya Sosialisasi Terkait Kanal - Kanal Pembayaran Digital yang Dimiliki.	1. Masyarakat yang Belum Mengenal Kanal - Kanal Pembayaran Pajak secara Digital.	Jaringan Telekomunikasi/ Internet yang belum merata di semua Wilayah Kota kendari
		2. Belum siapnya SDM dalam Pengelolaan Transaksi Digital dan Kurangnya Sosialisasi Kepada Masyarakat Terkait Elektronifikasi Transaksi.		2. Karakteristik Masyarakat Kota Kendari yang Terbiasa Membayar Pajak melalui Teller.	
9	Pajak MBLB	1. Kurangnya Monitoring dan Evaluasi dalam Pemanfaatan Kanal - Kanal Pembayaran Digital yang Disediakan Bank Dalam Proses Pembayaran Pajak Daerah.	1. Kurangnya Sosialisasi Terkait Kanal - Kanal Pembayaran Digital yang dimiliki.	1. Masyarakat yang Belum Mengenal Kanal - Kanal Pembayaran Pajak Secara Digital.	Jaringan Telekomunikasi/ Internet yang belum merata di semua wilayah Kota Kendari
		2. Belum Siapnya SDM Dalam Pengelolaan Transaksi Digital dan Kurangnya Sosialisasi Kepada Masyarakat Terkait Elektronifikasi Transaksi.		2. Karakteristik Masyarakat Kota Kendari yang Terbiasa Membayar Pajak melalui Teller.	
10	Pajak Bumi dan Bangunan	Wilayah Kota Kendari dengan Karakteristik Masyarakat yang plural menjadi	1. Kurangnya Sosialisasi Terkait Kanal - Kanal	1. Kecenderungan Membayar Pajak PBB Melalui Teller.	Jaringan Telekomunikasi/ Internet yang belum merata di

		Tantangan Tersendiri dalam Upaya Transaksi Pembayaran Pajak PBB.	Pembayaran Digital yang dimiliki.		semua wilayah Kota Kendari
		Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terhadap penggunaan aplikasi digital (Qris,linkAja)	Pembayaran yang tdk real time (H+1)	2. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Terkait Kanal - Kanal Pembayaran Pajak PBB secara Digital.	
11	BPHTB	Belum Memaksimalkan Kanal - Kanal Pembayaran Digital	Belum membangun system untuk mengintegrasikan pembayaran ke non tunai	Masyarakat yang Belum Mengenal Kanal - Kanal Pembayaran Pajak BPHTB Secara Digital.	Jaringan Telekomunikasi/ Internet yang belum merata di semua wilayah Kota Kendari
B. RETRIBUSI DAERAH					
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Di RSUD sudah dikembangkan namun pelaksanaannya belum optimal	Belum membangun system untuk mengintegrasikan pembayaran ke non tunai	1. WP masih lebih suka dengan transaksi di teller karena mendapatkan bukti bayar di teller.	Jaringan Telekomunikasi/ Internet yang belum merata di semua wilayah Kota Kendari
				2. Sebagian WR tidak memiliki rekening di bank.	
				3. WR belum familiar terhadap kanal pembayaran dan tatacara pembayaran.	
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	Belum melakukan pengembangan atau integrasi sistem pembayaran non tunai ke dalam sistem menejemen layanan.	1. Bank Sultra Belum Memiliki Kantor Kas/ Kantor Cabang Pembantu/ Kantor Cabang dan Akses ATM yang merata di setiap Kecamatan.	1. Tingginya Preferensi Penggunaan Uang Tunai dalam Pembayaran Retribusi Daerah.	Jaringan Telekomunikasi/ Internet yang belum merata di semua wilayah Kota Kendari
				2. Sebagian WR tidak memiliki rekening di bank.	
				3. WR belum familiar terhadap kanal pembayaran dan tatacara pembayaran antar bank.	

3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	Belum melakukan pengembangan atau integrasi sistem pembayaran non tunai ke dalam sistem manajemen layanan.	1. Bank Sultra Belum Memiliki Kantor Kas/ Kantor Cabang Pembantu/ Kantor Cabang dan Akses ATM yang merata di setiap kecamatan.	WP masih lebih suka dengan transaksi di teller karena mendapatkan bukti bayar di teller.	Jaringan Telekomunikasi/ Internet yang belum merata di semua wilayah Kota Kendari
			2. Belum adanya kerjasamanya dengan Penyediaan Jasa Pembayaran (PJP) dan ATM Bank Sultra		
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Belum tersedia aplikasi pengelolaan pelayanan parkir di tepi jalan umum untuk WR parkir sehingga pelaksanaan pemungutan parkir di laksanakan oleh para Juru parkir tanpa menggunakan aplikasi E-Parkir berbasis kode bayar.	1. Bank belum dapat menerima pembayaran secara digital di karenakan belum ada aplikasi E-parkir untuk WR parkir.	WR belum familiar terhadap kanal pembayaran dan tatacara pembayaran.	Jaringan Telekomunikasi/ Internet yang belum merata di semua wilayah Kota Kendari
5	Retribusi Pelayanan Pasar	Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait sistem pembayaran digital (DAOA digital)	Bank Sultra Belum Memiliki Kantor Kas/ Kantor Cabang Pembantu/ Kantor Cabang dan Akses ATM yang merata di setiap kecamatan	1. Sebagian WR tidak memiliki rekening di bank.	
				2. WR belum familiar terhadap kanal pembayaran	
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Belum melakukan pengembangan atau integrasi sistem pembayaran non tunai ke dalam sistem manajemen layanan.	Belum adanya kerjasamanya dengan Penyediaan Jasa Pembayaran (PJP) dan ATM Bank Sultra	WR belum familiar terhadap kanal pembayaran dan tatacara pembayaran.	Jaringan Telekomunikasi/ Internet yang belum merata di semua wilayah Kota Kendari
7	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	Belum melakukan pengembangan atau integrasi sistem pembayaran non tunai ke dalam sistem manajemen layanan.	1. Bank Sultra Belum Memiliki Kantor Kas/ Kantor Cabang Pembantu/ Kantor Cabang dan Akses ATM yang merata di setiap kecamatan.	WP masih lebih suka dengan transaksi di teller karena mendapatkan bukti bayar di teller.	Jaringan Telekomunikasi/ Internet yang belum merata di semua wilayah Kota Kendari

			2. Belum adanya kerjasamanya dengan Penyediaan Jasa Pembayaran (PJP) dan ATM Bank Sultra		
8	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	Belum melakukan pengembangan atau integrasi sistem pembayaran non tunai ke dalam sistem manajemen layanan.	1. Bank Sultra Belum Memiliki Kantor Kas/ Kantor Cabang Pembantu/ Kantor Cabang dan Akses ATM yang merata di setiap kecamatan.	WP masih lebih suka dengan transaksi di teller karena mendapatkan bukti bayar di teller.	Jaringan Telekomunikasi/ Internet yang belum merata di semua wilayah Kota Kendari
			2. Belum adanya kerjasamanya dengan Penyediaan Jasa Pembayaran (PJP) dan ATM Bank Sultra		
9	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	Belum melakukan pengembangan atau integrasi sistem pembayaran non tunai ke dalam sistem manajemen layanan.	1. Bank Sultra Belum Memiliki Kantor Kas/ Kantor Cabang Pembantu/ Kantor Cabang dan Akses ATM yang merata di setiap kecamatan.	WP masih lebih suka dengan transaksi di teller karena mendapatkan bukti bayar di teller.	Jaringan Telekomunikasi/ Internet yang belum merata di semua wilayah Kota Kendari
			2. Belum adanya kerjasamanya dengan Penyediaan Jasa Pembayaran (PJP) dan ATM Bank Sultra		
10	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	Belum semua pengelolaan retribusi tempat khusus parkir menggunakan aplikasi.	1. Bank Sultra Belum Memiliki Kantor Kas/ Kantor Cabang Pembantu/ Kantor Cabang dan Akses ATM yang merata di setiap Kecamatan.	WR belum familiar terhadap kanal pembayaran dan tatacara pembayaran.	Jaringan Telekomunikasi/ Internet yang belum merata di semua wilayah Kota Kendari
			2. Belum adanya kerjasamanya dengan Penyediaan Jasa Pembayaran		

			(PJP) dan ATM Bank Sultra		
11	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	Pembayaran retribusi Pelayanan pengendalian menara telekomunikasi susah teridentifikasi.	1. Pembayaran retribusi Pelayanan pengendalian menara telekomunikasi susah teridentifikasi.	WR dan masyarakat belum mendapatkan kode bayar/SKRD untuk melakukan pembayaran langsung ke rekening RKUD.	Jaringan Telekomunikasi/ Internet yang belum merata di semua wilayah Kota Kendari
			2. Belum adanya kerjasamanya dengan Penyediaan Jasa Pembayaran (PJP) dan ATM Bank Sultra		
12	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Pengelolaan retribusi pemakaian kekayaan daerah menggunakan aplikasi hanya belum optimal	Belum adanya kerjasamanya dengan Penyediaan Jasa Pembayaran (PJP) dan ATM Bank Sultra	Sebagian WR tidak memiliki HP yang mendukung pembayaran nontunai.	Jaringan Telekomunikasi/ Internet yang belum merata di semua wilayah Kota Kendari
13	Retribusi Tempat Pelelangan	Belum tersedia pengelolaan retribusi tempat pelelangan ikan menggunakan aplikasi.	Belum adanya kerjasamanya dengan Penyediaan Jasa Pembayaran (PJP) dan ATM Bank Sultra	1. WR belum familiar terhadap kanal pembayaran dan tatacara pembayaran antar bank.	Jaringan Telekomunikasi/ Internet yang belum merata di semua wilayah Kota Kendari
				2. WR dan masyarakat belum mendapatkan kode bayar/SKRD untuk melakukan pembayaran langsung ke rekening RKUD.	
				3. WR lebih suka melakukan pembayaran secara tunai.	
14	Retribusi Terminal	Belum melakukan pengembangan atau integrasi sistem pembayaran non tunai ke dalam sistem manajemen layanan.	1. Bank Sultra Belum Memiliki Kantor Kas/ Kantor Cabang Pembantu/ Kantor Cabang dan Akses ATM yang merata di setiap kecamatan.	WP masih lebih suka dengan transaksi di teller karena mendapatkan bukti bayar di teller.	Jaringan Telekomunikasi/ Internet yang belum merata di semua wilayah Kota Kendari
			2. Belum adanya kerjasamanya dengan Penyediaan Jasa Pembayaran (PJP) dan		

			ATM Bank Sultra		
15	Retribusi Tempat Khusus Parkir	Belum semua pengelolaan retribusi tempat khusus parkir menggunakan aplikasi.	Belum adanya kerjasamanya dengan Penyediaan Jasa Pembayaran (PJP) dan ATM Bank Sultra	WR belum familiar terhadap kanal pembayaran dan tatacara pembayaran.	Jaringan Telekomunikasi/ Internet yang belum merata di semua wilayah Kota Kendari
16	Retribusi Rumah Potong Hewan	Belum semua pengelolaan retribusi Rumah Potong Hewan menggunakan aplikasi.	Belum adanya kerjasamanya dengan Penyediaan Jasa Pembayaran (PJP) dan ATM Bank Sultra	1. WR belum familiar terhadap kanal pembayaran dan tatacara pembayaran antar bank.	Jaringan Telekomunikasi/ Internet yang belum merata di semua wilayah Kota Kendari
				2. WR dan masyarakat belum mendapatkan kode bayar/SKRD untuk melakukan pembayaran langsung ke rekening RKUD.	
				3. WR lebih suka melakukan pembayaran secara tunai.	
17	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	Belum melakukan pengembangan atau integrasi sistem pembayaran non tunai ke dalam sistem manajemen layanan.	1. Bank Sultra Belum Memiliki Kantor Kas/ Kantor Cabang Pembantu/ Kantor Cabang dan Akses ATM yang merata di setiap kecamatan.	WP masih lebih suka dengan transaksi di teller karena mendapatkan bukti bayar di teller.	Jaringan Telekomunikasi/ Internet yang belum merata di semua wilayah Kota Kendari
			2. Belum adanya kerjasamanya dengan Penyediaan Jasa Pembayaran (PJP) dan ATM Bank Sultra		
18	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Sosialisasi kepada WR kurang maksimal	Belum adanya kerjasamanya dengan Penyediaan Jasa Pembayaran (PJP) dan ATM Bank Sultra	WR belum familiar terhadap kanal pembayaran dan tatacara pembayaran.	Jaringan Telekomunikasi/ Internet yang belum merata di semua wilayah Kota Kendari
19	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	Belum semua pengelolaan retribusi Penjualan produksi usaha daerah menggunakan aplikasi.	Belum adanya kerjasamanya dengan Penyediaan Jasa Pembayaran (PJP) dan ATM Bank Sultra	WR belum familiar terhadap kanal pembayaran dan tatacara pembayaran.	Jaringan Telekomunikasi/ Internet yang belum merata di semua wilayah Kota Kendari
20	Retribusi Izin	1. Belum Optimalnya	1. Belum Optimal	WR dan masyarakat	1. Jaringan Telekomu

	Mendirikan Bangunan	Perluasan Layanan Objek Retribusi.	dalam Memfasilitasi Pembayaran Retribusi Daerah dengan Metode QRIS.	belum mendapatkan kode bayar/SKRD untuk melakukan pembayaran langsung ke rekening RKUD.	nikasi/ Internet yang belum merata di semua wilayah Kota Kendari
		Pembayaran retribusi IMB susah teridentifikasi	2. Pembayaran retribusi IMB susah teridentifikasi.		2. Jaringan Telekomunikasi/ Internet yang belum merata di semua wilayah Kota Kendari
21	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman	Belum melakukan pengembangan atau integrasi sistem pembayaran non tunai ke dalam sistem manajemen layanan.	Belum adanya kerjasamanya dengan Penyediaan Jasa Pembayaran (PJP) dan ATM Bank Sultra		
22	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	Belum melakukan pengembangan atau integrasi sistem pembayaran non tunai ke dalam sistem manajemen layanan.	Belum adanya kerjasamanya dengan Penyediaan Jasa Pembayaran (PJP) dan ATM Bank Sultra		

Melihat gambaran permasalahan di atas, maka sebagai pemecahan atas permasalahan yang timbul dari Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah di Kota Kendari disusun rencana penyelesaian permasalahan, sebagai berikut :

**PETA SOLUSI PERMASALAHAN ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI
PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI**

No.	Jenis Pendapatan dan Belanja	Penyelesaian Permasalahan			
		Pemerintah Daerah	Bank RKUD	Masyarakat	Infrastruktur TIK
A. PAJAK DAERAH					
1.	Pendidikan dan Pelatihan	Mengadakan Bimbingan Teknis Terkait Pelaksanaan Elektronifikasi dan Digitalisasi Transaksi Pendapatan Pajak Daerah.			
2.	Pemanfaatan dan Pengembangan Kanal Pembayaran Digital	1. Meminimalisasi Pembayaran Pajak Daerah secara non tunai	Memfasilitasi Kanal - Kanal Pembayaran Pajak secara Digital	Memperkenalkan Fungsi Handphone Dalam Mendukung Pembayaran NonTunai	Menyediakan Infrastruktur Jaringan Listrik dan Internet
		2. Memaksimalkan Kanal - Kanal Pembayaran Digital			
3.	Luasnya Wilayah Kota Kendari	Optimalisasi Pajak Daerah yang Meliputi Pendataan dan Penagihan dengan Melaksanakan Pelayanan Keliling di setiap Kecamatan dan kelurahan.	Memfasilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pelaksanaan Pelayanan Keliling dan Penyediaan Kantor Kas / Kantor Cabang Pembantu serta Anjungan Tunai Mandiri di setiap Kecamatan.		Menyediakan Infrastruktur Jaringan Listrik dan Internet
4.	Monitoring dan Evaluasi	Mengoptimalkan Rekonsiliasi antara Pemda dan Bank Sultra untuk Mempercepat Proses Validasi dan Meminimalisasi Kesalahan Penyetoran oleh Wajib Pajak.	Melakukan Integrasi Sistem Penerimaan Pajak Daerah		
5.	Menimalisasi Preferensi Penggunaan Uang Tunai Pada Masyarakat		1. Mensosialisasikan Gerakan Gemar Menabung	Mengajak Masyarakat untuk Menyimpan Uangnya di bank	Menyediakan Infrastruktur Jaringan Listrik dan Internet
			2. Penyediaan Kantor Kas / Kantor Cabang Pembantu Serta Anjungan Tunai Mandiri di setiap Kecamatan		
B. RETRIBUSI DAERAH					
1.	Pendidikan dan Pelatihan	Mengadakan Bimbingan Teknis Terkait Pelaksanaan Elektronifikasi dan Digitalisasi Transaksi Pendapatan Retribusi Daerah.			
2.	Pemanfaatan dan Pengembangan	1. Mengoptimalkan Pembayaran Retribusi Daerah	1. Memfasilitasi Kanal - Kanal Pembayaran	1. Memperkenalkan Fungsi Handphone	Menyediakan Infrastruktur Jaringan Listrik

	Kanal Pembayaran	melalui Kode Bayar.	Retribusi Daerah Secara Digital.	dalam Mendukung Pembayaran Non Tunai.	dan Internet
		2. Mengoptimalkan dan Mengembangkan Pembayaran Retribusi Daerah dengan QRIS.	2. Mengembangkan Kanal Pembayaran melalui Virtual Account dan QRIS.	2. Memperkenalkan Fungsi ATM sebagai Instrumen Pembayaran Retribusi Daerah.	
		3. Melakukan Kerja Sama dengan Bank Sultra Terkait Optimalisasi Digitalisasi Layanan dan Elektronifikasi Transaksi.	3. Melakukan Kerja Sama dengan Perangkat Daerah Terkait Optimalisasi Digitalisasi Layanan dan Elektronifikasi Transaksi.		
3.	Monitoring dan Evaluasi	Membuat Dashboard Monitoring Pendapatan dengan Melakukan Integrasi Sistem Aplikasi.	Membuat Dashboard Monitoring Pendapatan dengan Melakukan Integrasi Sistem Aplikasi.		Menyediakan Infrastruktur Jaringan Listrik dan Internet
4.	Meminimalisasi Preferensi Penggunaan Uang Tunai Pada Masyarakat		1. Mensosialisasikan Gerakan Gemar Menabung.	Mengajak Masyarakat untuk Menyimpan Uangnya Di bank.	Menyediakan Infrastruktur Jaringan Listrik dan Internet
			2. Penyediaan Kantor Kas/ Kantor Cabang Pembantu serta Anjungan Tunai Mandiri di setiap Kecamatan.		
5.	Monitoring dan Evaluasi	Mengoptimalkan Rekonsiliasi Antara Pemda dan Bank Sultra Untuk Mempercepat Proses Validasi dan Meminimalisasi Kesalahan Penyetoran Oleh Wajib Pajak.	Melakukan Integrasi Sistem Penerimaan Pajak Daerah.		
6.	Meminimalisasi Preferensi Penggunaan Uang Tunai Pada Masyarakat	1. Mensosialisasikan Gerakan Gemar Menabung.	Mengajak Masyarakat Untuk Menyimpan Uangnya Di bank.		Menyediakan Infrastruktur Jaringan Listrik dan Internet
		2. Penyediaan Kantor Kas / Kantor Cabang Pembantu serta Anjungan Tunai Mandiri Di Setiap Kecamatan.			

VI. RENCANA KERJA ETPD

1. Rencana Kerja ETPD

Program Kerja Elektonifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Kota Kendari sebagai berikut :

Tabel 4.1

Program Kerja Elektonifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Kota Kendari

No.	Kegiatan	Penanggung Jawab
1.	Pemberian alternatif pembayaran dan optimalisasi dengan menggunakan QRIS dan kanal pembayaran lainnya.	Semua Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan.
2.	Pembayaran dan Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah langsung ke Bank secara non tunai	Semua Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan.
3.	Sosialisasi Kepada OPD Pengelola Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terkait Penerimaan Non Tunai.	Semua Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan.
4.	Pengembangan Aplikasi untuk Pengelolaan Pendapatan Daerah.	BAPENDA/ Diskominfo/ Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan.
5.	Pemanfaatan satker yang terintegrasi dengan Bank RKUD.	BKAD/Bank Sultra

a. Rencana Aksi Kerja Tahun 2022 - 2025

Tabel 4.2

Rencana Aksi Kerja Pemerintah Kota Kendari Tahun 2022 - 2025

No.	Program Kerja	Tahapan/ Aktivitas	Target	Perkiraan Tahun Penyelesaian	Penanggung Jawab
1.	Sosialisasi transaksi pada Penyelenggara Layanan Retribusi di Pemerintah Kota Kendari menggunakan Kanal Pembayaran	Sosialisasi kepada Penyelenggara layanan Retribusi Kota Kendari untuk melakukan pembayaran melalui QRIS,EDC.	2022 = 100%	2022	Bank Sultra
2.	Sosialisasi Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Kendari	Sosialisasi para Wajib Pajak Daerah dan Retribusi.	2022 = 75% 2023 = 100%	2022 - 2023	Bank Sultra/ Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan
3.	Pembayaran dan optimalisasi Retribusi langsung ke Bank secara non tunai	Sosialisasi kepada Penyelenggara layanan Retribusi Kota Kendari untuk melakukan pembayaran melalui QRIS,EDC.	2022 = 75% 2023 = 100%	2022 - 2023	Perangkat Daerah Pengelola Retribusi
4.	Penggunaan <i>mobile banking</i> oleh Pegawai Pemerintah Kota Kendari	Sosialisasi dan himbauan penggunaan <i>mobile banking</i> .	2022 = 50% 2023 = 100%	2023	Bank Sultra/Perangkat Daerah Pengelola pendapatan
6.	Sosialisasi dan penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran di merchant	Sosialisasi melalui pemasangan banner dan pemasangan QRIS di merchant.	Jumlah merchant QRIS meningkat	2025	Bank Sultra

b. Time Line Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Kota Kendari

Tabel 4.3

Time Line Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Pemerintah Kota Kendari Tahun 2022 - 2025

NO	URAIAN KEGIATAN	2022				2023				2024				2025				PENANGGUNG JAWAB
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1.	Pemberian alternatif pembayaran dan optimalisasi dengan menggunakan QRIS dan Kanal Pembayaran lainnya	Blue	Blue	Blue	Blue	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Semua OPD Pengelola Pendapatan
2.	Pemberian Alternatif Pembayaran menggunakan Qris dan Kanal Pembayaran Lainnya untuk Layanan Kesehatan	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Dinkes
3.	Pemanfaatan satker yang Terintegrasi ke semua OPD sampai level Kelurahan se kota Kendari	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Bank Sultra/BKAD
4.	Sosialisasi Kepada OPD Pengelola Pendapatan Pajak, Retribusi Daerah dan Bendahara Penerima Terkait Penerimaan Non Tunai	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Semua OPD Pengelola Pendapatan
5.	Pengembangan Aplikasi untuk Pengelolaan Pendapatan Daerah	Red	Red	Red	Red	Blue	Blue	Blue	Blue	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Green	Green	Green	Green	Semua OPD Pengelola Pendapatan
6.	Integrasi Aplikasi/Sistem Pengelola Pendapatan Retribusi Daerah	Blue	Blue	Blue	Blue	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Semua OPD Pengelola Pendapatan
7.	Koordinasi dengan Bank Sultra	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Bank Sultra/BAPENDA
8.	Bimbingan Teknis kepada User OPD Pengelola Pendapatan	Blue	Blue	Blue	Blue	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Semua OPD Pengelola Pendapatan

Keterangan :

- Pelaksanaan 25%
- Pelaksanaan 50%
- Pelaksanaan 75%
- Pelaksanaan 100%

NO.	URAIAN	JUMLAH WP/ TRANSAKSI	TARGET ETPD										Penanggung Jawab
			2021		2022		2023		2024		2025		
			Tunai	Non tunai Digital	Tunai	Non tunai Digital	Tunai	Non tunai Digital	Tunai	Non tunai Digital	Tunai	Non tunai Digital	
	Pengendalian Menara Telekomunikasi												
12.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		20%	80%	10%	90%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	Dinas Terkait
13.	Retribusi Tempat Pelelangan		10%	90%	7%	93%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	Dinas Perikanan
14.	Retribusi Terminal		100%	0%	75%	25%	50%	50%	0%	100%	0%	100%	Dishub
15.	Retribusi Tempat Khusus Parkir		35%	65%	15%	85%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	Dishub
16.	Retribusi Rumah Potong Hewan		100%	0%	70%	30%	50%	50%	0%	100%	0%	100%	Dinas Pertanian
17.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan		100%	0%	75%	25%	50%	50%	0%	100%	0%	100%	Dishub
18.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga		50%	50%	25%	75%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	Disbudpar
19.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah		100%	0%	50%	50%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	Dinas Perikanan
20.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan		0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	PUPR
21.	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman		0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	Disdagkop
22.	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum		100%	0%	75%	25%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	Dishub

